



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## OPTIMALISASI POTENSI KOMODITAS SINGKONG MENJADI KOMODITAS STRATEGIS

**Rizki Mona Syawlia**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[rizki.syawlia@dpr.go.id](mailto:rizki.syawlia@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Singkong memiliki potensi besar sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, baik sebagai sumber karbohidrat alternatif maupun bahan baku industri. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menempati peringkat ketiga produsen singkong terbesar di dunia, setelah Nigeria dan Thailand, dengan produksi tahunan mencapai lebih dari 20 juta ton. Komoditas ini memiliki keunggulan agronomis yang sangat adaptif—masa tanamnya singkat, tahan terhadap kekeringan, dan dapat tumbuh di lahan marginal. Dengan keunggulan tersebut, singkong berpotensi besar menjadi solusi domestik dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum dan jagung.

Potensi produksi singkong ada di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Lampung merupakan produsen utama singkong nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen dari total singkong nasional atau sekitar 7,9 juta ton per tahun. Provinsi Lampung telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis singkong. Nilai ekonomi dari produksi singkong telah menyumbang lebih dari Rp50 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, mulai dari budidaya hingga industri pengolahan, yang melibatkan lebih dari 800.000 keluarga. Sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur secara konsisten mencatat produksi singkong di atas 2 juta ton per tahun, sedangkan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan perkembangan signifikan dalam budidaya singkong, terutama melalui program diversifikasi pangan dan pengembangan bioenergi. Keberagaman wilayah ini memperlihatkan bahwa singkong memiliki basis produksi nasional yang luas dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas strategis.

Permintaan terhadap singkong dan produk turunannya terus meningkat, terutama dari sektor industri makanan, pakan ternak, farmasi, hingga energi terbarukan seperti bioetanol. Untuk memenuhi industri, dibutuhkan pasokan singkong berkualitas tinggi dengan kadar pati minimal 25 persen secara konsisten. Namun, sebagian besar produksi domestik belum mampu memenuhi spesifikasi tersebut, disebabkan antara lain oleh penggunaan varietas lokal dengan produktivitas rendah, terbatasnya akses petani terhadap pertanian modern, dan sistem tata niaga yang masih belum optimal. Situasi ini berdampak pada lemahnya posisi tawar petani di hadapan industri, terutama karena belum adanya regulasi harga dasar di tingkat nasional. Fluktuasi harga sering kali membuat petani mengalami kerugian, khususnya saat panen raya, dan membuat mereka menanggung risiko paling besar dalam rantai pasok, sementara sebagian besar keuntungan mengalir ke sektor hilir. Akibatnya, industri lebih memilih menggunakan tepung tapioka impor yang lebih murah, stabil, dan bebas bea masuk, meskipun Indonesia memiliki kapasitas produksi yang memadai.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan sistem perdagangan yang berpihak pada petani, antara lain melalui penetapan harga dasar yang stabil. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan langkah konkret melalui penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan harga pembelian ubi kayu oleh industri sebesar Rp1.350/kg dengan potongan maksimal 30 persen tanpa pengurangan kadar pati. Kebijakan ini bertujuan untuk

menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan dan memperkuat posisi petani dalam rantai pasok. Upaya strategis lainnya dilakukan melalui usulan Pemerintah Provinsi Lampung agar singkong ditetapkan sebagai komoditas pangan strategis nasional. Usulan ini disampaikan dalam RDPU bersama Badan Legislasi DPR RI pada 25 Juni 2025. Usulan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang lebih kuat bagi pengembangan singkong di tingkat nasional.

Guna mendorong singkong menjadi komoditas strategis nasional, diperlukan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir. *Pertama*, peningkatan produktivitas melalui penyediaan varietas unggul dengan kadar pati tinggi dan adaptif terhadap berbagai kondisi agroklimat. *Kedua*, penguatan infrastruktur pascapanen seperti fasilitas penyimpanan, alat pengering, dan sentra pengolahan terpadu untuk menjaga kualitas hasil panen dan meningkatkan nilai tambah. *Ketiga*, harmonisasi kebijakan lintas sektor, termasuk pengaturan tata niaga dan perlindungan pasar domestik, agar produksi lokal memiliki ruang bersaing yang adil. *Keempat*, perlindungan terhadap petani singkong melalui penetapan harga acuan, skema subsidi input produksi, serta insentif bagi kemitraan yang berkeadilan antara petani dan pelaku industri. *Kelima*, pengembangan sistem data dan pemantauan berbasis teknologi untuk memastikan efektivitas program, meningkatkan transparansi distribusi manfaat, dan menjaga keberlanjutan ekosistem singkong nasional.

## Atensi DPR

Singkong memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas strategis nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi hulu hingga hilir. Komisi IV DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ini, khususnya melalui fungsi pengawasan untuk memastikan program kementerian terkait benar-benar berpihak pada petani. Hal ini mencakup penyediaan varietas unggul, subsidi input produksi, serta akses terhadap teknologi pascapanen. Pengawasan juga perlu difokuskan pada efektivitas penetapan harga acuan dan larangan impor saat musim panen agar petani tidak dirugikan. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI diharapkan mendorong alokasi dana untuk penguatan kelembagaan, pembiayaan inklusif, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Sinergi lintas sektor perlu diarahkan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi petani, sehingga singkong dapat benar-benar memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi pelaku utamanya.

## Sumber

antaranews.com, 23 Juni 2025;  
cnbcindonesia.com, 25 Juni 2025;  
finance.detik.com, 25 Juni 2025; dan  
tribunnews.com, 25 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making